BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Promosi kesehatan adalah program kesehatan yang dirancang untuk membawa perubahan, baik di dalam masyarakat sendiri, maupun dalam organisasi dan lingkungannya. Promosi kesehatan berperan penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui pembelajaran dari, oleh dan bersama masyarakat sesuai dengan lingkungan sosial budaya setempat, agar masyarakat dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan (Notoatmodjo, 2017).

Promosi Kesehatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui pembelajaran dari, oleh dan bersama masyarakat sesuai dengan lingkungan sosial budaya setempat, agar masyarakat dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan. Promosi Kesehatan merupakan salah satu Upaya Kesehatan Wajib Puskesmas selain Upaya Kesehatan Lingkungan, Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta KB, Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat, Upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular, dan Upaya Pengobatan (Fitriani, 2016).

Promosi kesehatan merupakan masalah kualitas inti untuk meningkatkan kesehatan dan mempertahankan kualitas hidup. Standar untuk promosi kesehatan di rumah sakit diperlukan untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan. Oleh karena itu, WHO membentuk kelompok kerja pada Konferensi Internasional ke-9 tentang Rumah Sakit Promosi Kesehatan, Kopenhagen, Mei 2001. Sejak itu beberapa kelompok kerja dan jaringan negara telah bekerja untuk pengembangan

standar. Sebagai hasilnya, lima standar inti yang berlaku untuk semua rumah sakit telah dikembangkan sesuai dengan persyaratan internasional yang ditetapkan oleh program ALPHA yang dikembangkan oleh *International 6 Society for Quality in Health* (Herlambang, S, 2016).

WHO telah mengembangkan lima standar promosi kesehatan rumah sakit yang dapat diaplikasikan pada semua rumah sakit. Standar pertama, rumah sakit harus memiliki kebijakan tertulis, kedua yaitu kewajiban untuk penilaian organisasi; ketiga menyatakan bahwa organisasi harus menyediakan informasi yang signifikan tentang penyakit mereka atau kondisi kesehatan dan intervensi promosi kesehatan harus dilakukan pada semua pasien; keempat pengembangan rumah sakit sebagai tempat kerja yang sehat dan standar kelima penawaran dengan kontinuitas dan kerjasama, menuntut pendekatan direncanakan untuk kolaborasi dengan sektor-sektor pelayanan kesehatan dan lembaga. Standar tersebut telah diuji cobakan di 36 rumah sakit negara di Eropa dan telah dinilai relevan dan mampu terlaksana (Winasari, A, 2015).

Standar terpenting dari promosi kesehatan rumah sakit adalah kebijakan manajemen, yang juga mempengaruhi standar lainnya. Mempertimbangkan fakta bahwa dari hampir 1000 rumah sakit di Iran Barat Laut, hanya lima rumah sakit yang menjadi anggota jaringan internasional rumah sakit dan layanan kesehatan yang mempromosikan kesehatan. Untuk itu sangat penting bahwa pimpinan dan pembuat kebijakan di setiap negara membuat kebijakan dan anggaran promosi kesehatan untuk rumah sakit dengan tujuan bergabung dengan jaringan *Health Promoting Hospitals*, dan melatih spesialis dibidang ini untuk meningkatkan

infrastruktur promosi kesehatan rumah sakit, dan membuat program untuk mendidik orang untuk berpartisipasi dalam program ini, dan mendorong mereka untuk berpartisipasi serta memantau dan mereformasi program-program ini (Yumiati et al., 2018).

Beberapa tugas promosi kesehatan telah dilaksanakan oleh beberapa rumah sakit di Iran. Untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, maka para pembuat kebijakan dan manajer layanan kesehatan harus membuat kebijakan dan panduan layanan promosi kesehatan yang jelas. Dan bahwa rumah sakit harus didesain dengan menggunakan sistem tertentu untuk meningkatkan dan mengevaluasi promosi kesehatan sehingga dapat mendorong para pembuat kebijakan dan administrator layanan kesehatan untuk berinvestasi pada sumber daya di PKRS. Setelah lebih dari satu dekade inisiasi proyek promosi dari WHO, PKRS sekarang terbukti tidak hanya visi, tetapi juga fokus terhadap strategi pembangunan rumah sakit (Alim, et al., 2019).

Promosi kesehatan di rumah sakit menjadi salah satu hal yang penting di Indonesia, terlebih di era Jaminan Kesehatan Nasional saat ini sudah seharusnya upaya pelayanan promosi kesehatan dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu contoh intervensi promosi kesehatan yang dilakukan dapat menurunkan kasus *readmission* atau kejadian pasien yang dirawat kembali di rumah sakit. *Readmission* merupakan salah satu indikator mutu pelayanan di rumah sakit. Studi yang dilakukan di tiga belas rumah sakit mitra kerja BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi. menemukan bahwa jumlah kasus *readmission* adalah 8,81% dengan insiden *readmission* paling banyak terjadi dalam kategori CMG yang sama dan

setidaknya di kategori tingkat keparahan yang sama. Biaya layanan rawat inap lebih mahal 104-113% dari biaya perawatan awal. Selain itu, sekitar 15-16% kasus penerimaan kembali tingkat keparahan meningkat dan 12-13% dari tingkat keparahan menurun (Anggraeni, F, 2017).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai per 1 Januari 2014 dan penerapan akreditasi rumah sakit versi 2012 mewajibkan rumah sakit untuk menerapkan pelayanan secara paripurna sebagaimana amanat UU RI No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Upaya promotif dan preventif menjadi suatu upaya terintegrasi dalam pelayanan rumah sakit. Upaya promotif dan preventif dapat dijadikan kendali mutu dan biaya dengan melalui peningkatan dan pemberdayaan pasien dan keluarga serta masyarakat rumah sakit untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung upaya penyembuhan dan rehabilitasi. Pentingnya pelaksanaan promosi kesehatan di rumah sakit dapat mewujudkan rumah sakit yang berkualitas yang memenuhi standar akreditasi rumah sakit baik nasional maupun internasional. Integrasi promosi kesehatan dalam asuhan pasien melalui peningkatan komunikasi dan edukasi yang efektif juga dapat mewujudkan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Sebagaian besar rumah sakit di Indonesia yang belum menerapkan promosi kesehatan secara optimal. Banyak rumah sakit yang masih terkendala dengan kurangnya SDM atau tenaga promosi kesehatan di rumah sakit dan juga kurang mendapat perhatian dari pihak direksi (Permenkes RI, 2018).

Penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Islam Surabaya menyatakan bahwa Rumah Sakit Islam Surabaya belum memiliki tenaga khusus yang fokus

dalam implementasi promosi kesehatan. Tim PKRS yang telah dibentuk terdiri dari petugas kesehatan yang memiliki tugas ganda selain mengambil tugas menjadi tim PKRS mereka juga memiliki tugas lain, seperti dokter, perawat, bidan dan lain-lain. Selain itu, pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan di rumah sakit Islam Surabaya tidak sepenuhnya memenuhi standar referensi dari standar PKRS oleh pusat promosi kesehatan pada tahun 2011. Hal ini diakibatkan karena mereka masih menganggap rumah sakit hanya berorientasi pada tindakan kuratif dan rehabilatif. Padahal rumah sakit juga mempunyai fungsi sosial untuk melakukan promosi kesehatan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (Nurjannah, S. R, 2020).

Penerapan standar promosi kesehatan rumah sakit menunjukkan adanya dampak positif dan menyebabkan peningkatan banyak parameter di rumah sakit intervensi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan promosi kesehatan di rumah sakit di seluruh negeri dan untuk meningkatkan anggota jaringan internasional promosi kesehatan rumah sakit, pembentukan program ini di semua rumah sakit pemerintah dan swasta disarankan. Selain keempat standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, menurut George Edward terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi (Sanah, N. 2016).

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti bermaksud mengkaji secara mendalam mengenai Implementasi Penyelenggaraan Program Promosi Kesehatan Di Era Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Wakatobi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengetahuan pasien tentang penyelenggaraan program promosi kesehatan di era jaminan kesehatan nasional pada RSUD Wakatobi?
2. Bagaimana monitoring dan evaluasi yang dilakukan pegawai dalam penyelenggaraan program promosi kesehatan di era jaminan kesehatan nasional pada RSUD Wakatobi?
3. Bagaimana sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan program promosi kesehatan di era jaminan kesehatan nasional pada RSUD Wakatobi?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengetahuan pasien tentang penyelenggaraan program promosi kesehatan di era jaminan kesehatan nasional pada RSUD Wakatobi.
2. Menganalisis monitoring dan evaluasi yang dilakukan pegawai dalam penyelenggaraan program promosi kesehatan di era jaminan kesehatan nasional pada RSUD Wakatobi.
3. Menganalisis sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan program promosi kesehatan di era jaminan kesehatan nasional pada RSUD Wakatobi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Program Kesehatan.

   Memberikan masukan kepada manajemen rumah sakit untuk mengevaluasi pelaksanaan program promosi kesehatan rumah sakit yang telah dibuat.

Sebagai dasar untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan program promosi kesehatan di RSUD Wakatobi.

2. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya kepustakaan ilmu kesehatan masyarakat khususnya bidang promosi kesehatan serta merupakan bahan rujukan atau bacaan bagi penelitian selanjutnya.

3. Manfaat bagi Peneliti

   Menambah pengetahuan tentang promosi kesehatan di rumah sakit serta menambah wawasan tentang pelaksanaan program promosi kesehatan di RSUD Wakatobi.